



► 2015, PNPM dihentikan

Tahun ini fokus untuk perkotaan

Oleh Yuspita Anjar Palupi
 HARIAN JOGJA

UMBULHARJO: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie menargetkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bisa terselesaikan hingga tahun 2015 mendatang.

Dengan harapan di tahun tersebut pembangunan infrastruktur pedesaan telah menjadi baik. Dan untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah.

"Program ini tidak bersifat terus-menerus. Harus ada *exit* [akhir]-nya. Targetnya terselesaikan di tahun 2015," terang Ical [panggilan Aburizal Bakrie] pada acara penyerahan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM tahun 2009 kepada Pemkot Jogja di Balaikota Jogja, Senin (9/2) kemarin.

Dikatakan tahun ini, pelaksanaan PNPM diorientasikan pada masyarakat perkotaan dengan tidak meninggalkan masyarakat pedesaan. Kota menurut hasil penelitian memiliki angka kemiskinan

PENYERAHAN BLM PNPM untuk kabupaten/kota di DIY

Wilayah	Jumlah dana	Sasaran
Kota Jogja	Rp11,49 miliar	14 kecamatan perkotaan
Bantul	Rp12,175 miliar	12 kecamatan perkotaan
	Rp9,90 miliar	5 kecamatan pedesaan
Gunungkidul	Rp39,20 miliar	18 kecamatan pedesaan
Sleman	Rp14,9 miliar	15 kecamatan perkotaan
	Rp2,90 miliar	2 kecamatan pedesaan
Kulonprogo	Rp1,4 miliar	1 kecamatan perkotaan
	Rp20,20 miliar	11 kecamatan pedesaan

SUMBER: KANTOR MENKO KESRA

nan jauh lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan yang ada di pedesaan. Yang diakibatkan dari arus urbanisasi masyarakat pedesaan ke kota.

Musyawaharah

Besar bantuan dana PNPM yang diberikan juga mengalami peningkatan, yakni sebesar Rp2,6 miliar per kecamatan untuk masyarakat perkotaan.

Dan dana sebesar Rp2,3 miliar per kecamatan untuk masyarakat pedesaan.

"Besarnya bantuan tahun lalu yang hanya Rp1,5 miliar per kecamatan baik untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan. Dan diharapkan bisa meningkat lagi di tahun 2010 menjadi Rp3 miliar per kecamatan baik untuk pedesaan ataupun perko-

taan," ujar dia. Lebih lanjut Ical mengingatkan agar usulan pelaksanaan PNPM harus benar-benar berasal dari masyarakat, dengan proses dimusyawarahkan terlebih dahulu. Baru kemudian dilaksanakan oleh masyarakat dengan pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Dan diperbolehkan usulan tersebut berupa pembangunan nonfisik, semisal untuk melakukan pelatihan komputer.

"Usulan PNPM harus hasil dari musreneng kalau di pedesaan. Jika di kelurahan usulan merupakan hasil dari musyawarah kelurahan," ingat Menko Kesra.

Sementara itu, Walikota Jogja, Herry Zudianto mengatakan dalam konteks pembangunan Kota Jogja program penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama.

Walikota Yogyakarta
 dan Daerah

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembanguna	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005